



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**PERAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT SEBAGAI
PENGELOLA INFORMASI DALAM RANGKA
PENGIMPLEMENTASIAN *OPEN GOVERNMENT* INDONESIA:
STUDI KASUS KELURAHAN CIPEDES BANDUNG**

Skripsi

Oleh

Nida Imansari

2014310036

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**PERAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT SEBAGAI
PENGELOLA INFORMASI DALAM RANGKA
PENGIMPLEMENTASIAN *OPEN GOVERNMENT* INDONESIA:
STUDI KASUS KELURAHAN CIPEDES BANDUNG**

Skripsi

Oleh

Nida Imansari

2014310036

Pembimbing

Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Bandung

2018

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nida Imansari
NPM : 2014310036
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Peran Kelompok Informasi Masyarakat
informasi (KIM) sebagai pelaksana pengelola
dalam rangka pengimplementasian
Open Government: Studi Kasus Kelurahan
Cipedes Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Agustus 2018

Nida Imansari

ABSTRAK

Nama : Nida Imansari
NPM : 2014310036
Judul : Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai pelaksana pengelola informasi dalam rangka pengimplementasian *Open Government*: Studi Kasus Kelurahan Cipedes Bandung

Di dalam *good governance* terdapat prinsip yang salah satunya yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan bersih (*Open and Clean Government*). Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melanjutkan upaya pembangunan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif melalui komitmen *Open Government* Indonesia (OGI).

Untuk mendukung pelaksanaan *Open Government* Indonesia, dibuatnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). KIM adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menggunakan konsep transparansi dan partisipasi, penelitian ini akan menganalisis peran KIM sebagai pelaksana pengelola informasi dalam rangka pengimplementasian *Open Government Indonesia*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang diperoleh yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian tersebut diperoleh yaitu adanya transparansi yang dilakukan oleh Kelompok Informasi Masyarakat, selain transparansi adanya peningkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Cipedes

Kata Kunci: *Good Governance*, *Open Governance* Indonesia, Kelompok Informasi Masyarakat

ABSTRACT

Name : Nida Imansari
NPM : 2014310036
Title : *The role of Community Information Group (KIM) as the executor managers of information in order to implement Open Government: Case Study : Kelurahan Cipedes Bandung*

In good governance there is one principle that is to create an open and clean government (Open and Clean Government). One of the steps taken is to continue a more open, participative and innovative development of government through Open Government Indonesia (OGI) commitment.

To support the implementation of Open Government Indonesia, the creation of Community Information Group (KIM). KIM is a public service agency established and managed from, by and for communities that are specifically oriented to information services and community empowerment.

Using the concept of transparency and participation, this study will analyze the role of KIM as the implementer of information managers in implementing Open Government Indonesia. The research method used is qualitative research, with case study research design. Data collection techniques obtained are through interviews, observation, and document studies.

The result of the research is obtained by the existence of transparency done by Community Information Group, beside transparency of increasing participation by society of Cipedes Urban Village

Keywords: Good Governance, Open Governance Indonesia, Community Information Group

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai pelaksana pengelola informasi dalam rangka pengimplementasian *Open Government* : Studi Kasus Kelurahan Cipedes Bandung “dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa akan sulit terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah senantiasa menjadi tempat pertama bagi penulis untuk mencurahkan berbagai hal. Untuk kedua orangtua penulis, Mama Tercinta Ifiana Purwitasari dan Papa Tercinta Kurnianto, terimakasih banyak atas segala doa, dukungan yang tidak pernah berhenti, dan segala sesuatu yangtelah diberikan. Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan FISIP UNPAR sekaligus dosen pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa meluangkan waktu dalam membantu penulis menyusun skripsi ini.
2. Tutik Rachmawati, Ph.d selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Seluruh Dosen, staff, karyawan administrasi, dan pekarya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, yang telah banyak membantu penulis dalam menunjang kegiatan perkuliahan selama ini.
4. Kakak tercinta Tiza Kurniasari, Deril Alvian tak lupa kakak ipar penulis Achmad Zaky dan Wulan Nuriana. Terimakasih banyak atas dukungan kalian untuk saya selama menempuh perkuliahan di UNPAR dan menyusun skripsi ini.

5. Noval Rizaldi yang meninggalkan saya H-2 minggu sebelum saya sidang skripsi, terimakasih telah menemani semasa perkuliahan saya di UNPAR, terimakasih atas kasih sayang dan memotivasi saya saat yang diberikan selama 3 tahun 8 bulan kita bersama.
6. Sahabat dari TK sampai saat ini “APCRIEL”; Putri, Annisa, Aurelia, Utami, Embun, dan Ulfah yang selalu mengingatkan saya untuk selalu focus kuliah dan cepat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat dari SMA sampai saat ini juga “Cabe Bodrek”; Ida, Gendis, Dwi, Sri, Erizka, Ifah, Sarah, Aprilia, Dian, Qibti yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat “BookFriendshipLove”: Finka, Agatha, Ratih, Tessa, Katharine, Surtha, dan Anna yang selalu menghibur dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Fira, Gadis, Sisil, Hana, Bella, Aulia, Lusi, Kiki, Widy, Dean yang selalu merespon positif ajakan main dari saya. Makasih sudah membuat saya bahagia
10. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti disebutkan satu per satu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap semoga kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dibalas oleh Allah SWT .Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada para pihak untuk memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan tulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandung , 2 Agustus

2018

Nida Imansari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II KERANGKA TEORI.....	12
2.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	12
2.1.1 <i>Open Government</i>	16
2.2 <i>Open Government Partnership</i>	19
2.2.1 Pengertian <i>Open Government</i> Indonesia	20
2.2.1.1 Transparansi.....	21
2.2.1.2 Partisipasi.....	23
2.2.1.3 Inovasi	28
2.3 Kelompok Informasi Masyarakat	30
2.4 Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian.....	32
3.2 Peran Peneliti.....	33
3.3 Objek Penelitian	33
3.4 Operasional Variabel	34
3.4.1 Transparansi.....	34
3.4.2 Partisipasi.....	36
3.4.3 Inovasi.....	37
3.5 Sumber Data.....	37

3.6	Prosedur Pengumpulan Data.....	38
3.6.1	Wawancara	38
3.6.2	Observasi	39
3.6.3	Studi Dokumen	40
3.7	Analisis Data	40
3.8	Validitas Data	41
BAB IV	PROFIL PENELITIAN	43
4.1	Kelompok Informasi Masyarakat di Indonesia	43
4.2	Kelompok Informasi Masyarakat di Kota Bandung	44
4.2.1	Pengertian	44
4.2.2	Visi Dan Misi KIM	44
4.2.3	Dasar Pembentukan KIM	45
4.2.4	Maksud Dan Tujuan Dibentuknya KIM	46
4.3	KIM Kelurahan Cipedes.....	47
BAB V	PEMBAHASAN.....	51
5.1	Gambaran Umum Kelompok Informasi Masyarakat	52
5.2	Transparansi	61
5.2.1	Government Openness/Access to Information	61
5.2.1.1	Mendapatkan Informasi Dengan Mudah	63
5.2.1.2	Dimensi Kelembagaan, Keuangan dan Pelayanan	64
5.2.1.3	Informasi Yang Relevan	65
5.3	Partisipasi	66
5.3.1	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan.....	69
5.3.2	Keterlibatan dalam pelaksanaan.....	70
5.3.3	Keterlibatan dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil.....	70
5.3.4	Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil	71
5.4	Inovasi.....	72
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
6.1	Kesimpulan.....	74
6.2	Saran.....	78
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi. Komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat¹. Peranan Informasi dan komunikasi dalam mendukung kehidupan masyarakat yang demokratis, transparansi, dan akuntabilitas telah mengubah pengalaman Bangsa dan Negara. Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dijamin oleh Undang-Undang. Kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan ciri penting suatu Negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Informasi yang dianggap baik apabila dapat memberikan informasi yang sesuai dengan fakta yang ada. Informasi adalah data yang sudah diproses ke dalam suatu

¹ http://www.kompasiana.com/elisigiro/pentingnya-komunikasi-dalam-kehidupan-manusia_552af7c1f17e61145bd623cc. . Diakses pada Sabtu 9 September 2017 pukul 18:50

bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan, dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. Sedangkan akurat berarti teliti, tepat, cermat

Informasi pada saat ini merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dengan adanya informasi maka kita dapat mengetahui kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar tanpa harus menyaksikannya secara langsung. Pada saat ini bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi. Dengan adanya keterbukaan informasi ini masyarakat diharapkan menjadi partisipan yang juga memberikan *feedback* atas kinerja pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Di era informasi yang kian berkembang ini kemudian mendorong munculnya keterbukaan informasi publik. .Adanya keterbukaan informasi merupakan hal mendasar dalam membangun sebuah komunikasi yang baik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik menjadi bukti adanya transparansi kepada masyarakat. Tujuan adanya keterbukaan informasi publik untuk menunjukkan bahwa negara benar-benar bersifat demokratis.Untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik,dibuatlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur dan juga menjamin tentang informasi.Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik. KIP ini wajib dilakukan oleh para penyelenggara

negara. Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap para penyelenggara negara.

.Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Instansi pemerintah maupun masyarakat, mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Instansi pemerintah memiliki peran dalam melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi tersebut sehingga dapat disalurkan kepada publik. Tentunya informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat tersebut telah memiliki relevansi yang tinggi sehingga dapat memberikan efek lebih kepada publik yang menerima.

Seiring bergulirnya reformasi yang menuntut adanya demokratisasi, transparansi, dan supremasi hukum, ketersediaan dan kebebasan untuk memperoleh informasi publik merupakan elemen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*). Derasnya arus informasi yang kian tak terbendung juga mendorong perkembangan teknologi informasi yang juga sebagai penunjang transfer informasi.

Salah satu tujuan dari diadakannya pemerintahan dengan bentuk demokrasi adalah menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*),dimana menurut The *United Nations Development Programme* (UNDP) didalamnya terdapat karakteristik partisipasi masyarakat ,kepastian hukum,transparansi,responsive,kepentingan umum,efektifitas dan efeisiensi,

akuntabilitas ,dan visi strategis ² khususnya untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan bersih (*Open and Clean Government*).

Menurut World Bank,*Open Government* adalah peningkatan transparansi, partisipasi warga negara dan kolaborasi antara pemerintah dan warga .Tata kelola Citizen-sentris, dengan keterbukaan sebagai pilar utama, meningkatkan penggunaan sumber daya publik, memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang inklusif dan meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah yang lebih terbuka adalah pemerintah yang memiliki posisi lebih baik untuk bertindak secara efektif dan efisien, untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta dan untuk merespons kebutuhan semua warga negara. Konsep “*Open Government*” (OG) pada dasarnya mengandung makna bahwa pemerintah yang terbuka/transparan, mengundang elemen rakyat untuk berpartisipasi dan mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi memecahkan berbagai masalah demi kesejahteraan rakyat. *Open government* ini mengaktualisasi secara praktis pengertian pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat³ .

Open government merupakan isu yang hangat di perbincangkan.Open government bukan berarti sebuah konsep baru yang berbeda dari konsep *good government*. Melainkan, *open government*, merupakan sebuah kelanjutan dari

² Sedarmayanti,*Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*,(Mandar Maju,2003), 01

³ <http://dephub.go.id/post/read/open-government-indonesia-ogi-13385> .Diakses pada Sabtu 9 September 2017 pukul 18:50

konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan pada dasarnya menuju tujuan yang sama..Transparansi relevan dengan "akuntabilitas" dan data sebagai "aset nasional." Partisipasi adalah memanfaatkan "pengetahuan yang tersebar" dan "keahlian kolektif". Kolaborasi adalah keterlibatan dalam aspek pemerintahan lainnya melalui penggunaan "alat, metode, dan sistem inovatif untuk bekerja sama.Dan transparansi adalah komponen inti dari pemerintahan terbuka⁴

. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melanjutkan upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif melalui komitmen *Open Government Indonesia* (OGI) .OGI merupakan bentuk konkrit keseriusan pemerintah Indonesia di dalam melakukan reformasi sektor publik di Indonesia secara menyeluruh. OGI dibuat sebagai upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif

Adapun yang menjadi komponen *Open Government Indonesia* yang pertama yaitu transparansi.Transparansi itu jelas, mudah, komunikatif,yang kedua yaitu partisipasi .Partisipasi disini dimaksudkan Mendengarkan, melibatkan, memberdayakan,dan yang ketiga yaitu inovasi .Yang di maksud inovasi yaitu berbeda, solutif, berbasis teknologi dan media.⁵ Melalui OGI diharapkan akan lahir ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional. Utamanya di dalam

⁴ <https://opengovdata.io/2014/transparency-participation-collaboration/>. Diakses pada Minggu 10 September 2017 pukul 13:38

⁵ <http://dephub.go.id/post/read/open-government-indonesia-ogi-13385>.Diakses pada Minggu 10 September 2017 pukul 18:50

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dengan OGI, pemerintah berupaya untuk membuka pintu sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berkolaborasi dan berperan aktif di dalam menentukan prioritas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan kolaborasi yang semakin kuat tersebut diyakini dapat menjadi solusi untuk memperkuat kualitas implementasi kebijakan publik pemerintah. Selain itu juga melalui proses pemerintahan yang terbuka, pemerintah Indonesia yakin akan banyak lahir inovasi-inovasi kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶

Di era transparansi sekarang ini, isu keterbukaan Informasi Publik telah menjadi satu hal yang disoroti berbagai institusi. Pasalnya, keterbukaan informasi dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukur akuntabilitas, pelayanan masyarakat hingga upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme⁷

Pemerintah gencar melakukan sosialisasi mengenai keterbukaan Informasi Publik ,salah satunya di Kota Bandung, Berbekal jargon sebagai kota cerdas (smart city), Pemerintah Kota Bandung bisa menjadi pelopor keterbukaan informasi bagi pemerintah daerah lainnya di Jawa Barat. Detail anggaran hingga pertanggungjawaban hasil program selayaknya mudah diterima masyarakat. Yakni secara lengkap terperinci dengan infografis di laman portal pemerintah

⁶ <http://opengovindonesia.org/front/ogework#about4>. Diakses pada Minggu 10 September 2017 pukul 21:50

⁷ <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/perlunya-grand-design-keterbukaan-informasi-publik>. Di akses pada Sabtu 14 Oktober 2017 pukul 18:50

daerah atau setiap akun media sosial Pemkot Bandung.⁸ Majunya keterbukaan Informasi Publik Kota Bandung membuat Kota Bandung merupakan salah satu dari 15 Kota Kabupaten di Indonesia yang menerima Penghargaan atas Keberhasilannya dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi kepada Publik di dalam Tata Kelola Pemerintahan.⁹

Untuk mendukung pelaksanaan *Open Government Indonesia*, kemudian dibentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). KIM adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.¹⁰

Pembentukan KIM bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan maupun persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dimana mereka mereka tinggal. Di dalam KIM, masyarakat tidak sekedar berbagi informasi antara anggotanya. Namun mereka juga bisa mencari informasi melalui berbagai media yang kemudian mendiskusikannya satu sama lain. Lebih dari itu, KIM juga bisa mengundang atau meminta bantuan dari pemerintah untuk memberikan penjelasan maupun penyuluhan terhadap persoalan yang sedang dianggap penting.

⁸ <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/01/01/soal-keterbukaan-informasi-smart-city-kota-bandung-baru-sebatas-jargon> Diakses pada 12 Agustus 2018 2018 pukul 10:02

⁹ <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/11/01/pemkot-bandung-dapat-anugerah-keterbukaan-informasi-publik-412754>

¹⁰ [Kominformo.malangkota.go.id](http://kominformo.malangkota.go.id) . Diakses pada 14 Oktober 2017 pukul 13:47

Dasar hukum pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yaitu Permenkominfo No. 8 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial,pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM, yang dibentuk oleh masyarakat,dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

KIM yang berfungsi sebagai media untuk menyampaikan berita-berita terkini kepada masyarakat terdapat di seluruh kelurahan di Indonesia,salah satunya yaitu KIM yang ada di Kelurahan Cipedes. KIM Cipedes dibentuk dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam bentuk komunikasi dan informasi melalui media sosial atau media elektronik dan media cetak seperti pemberitahuan, perencanaan, pelaksanaan dll, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, dalam hal ini lebih penting bagi masyarakat awam untuk mendapat informasi atau program-program pemerintah agar dapat dirasakan oleh warga masyarakat, begitu juga kegiatan yang di lakukan masyarakat dapat dilihat oleh pemerintah melalui KIM.

Sebelum adanya KIM Cipedes,masyarakat mendapat kesulitan dalam mengakses berbagai informasi terkait penyelenggaraan pemerintah.Masyarakat juga tidak terlalu tertarik dengan apapun yang terkait dengan pemerintahan.

Berikut bukti bahwa masyarakat terbantu dengan adanya KIM Cipedes,sebelum adanya KIM,masyarakat jarang dan tidak pernah menerima informasi ,kecuali orang-orang tertentu.¹¹ Sebelum KIM terbentuk, partisipasi masyarakat dapat dikatakan rendah,masyarakat banyak yang tidak berpartisipasi dengan kegiatan pemerintahan ,selain itu juga masyarakat sulit mendapatkan informasi,terutama terkait anggaran desa.

Dengan adanya KIM,masyarakat menjadi peka terhadap keadaan yang ada di sekitarnya .Dengan KIM,masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi . Bagi masyarakat, keterbukaan informasi bermanfaat guna terpenuhinya hak untuk mengetahui informasi publik ,sehingga pada gilirannya dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Dengan dibentuknya KIM,keterbukaan informasi publik menjadi terselenggara dengan baik

Untuk mendukung KIM Cipedes berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam membantu masyarakat dalam bidang informasi melalui website KIM Cipedes dan media cetak tabloid Swara Bandung yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.¹²

Alasan peneliti memilih topik mengenai Peran Kelompok Informasi Masyarakat ,peneliti beranggapan bahwa KIM merupakan lembaga layanan publik yang mendukung jalannya *Open Government* di Indonesia.Yang

¹¹ Hasil wawancara by whatsapp dengan AW,Ketua KIM Cipedes .Pada 9 Agustus 2018 pukul 11:16

¹² <https://kimcipedes.blogspot.com/p/blog-page.html>.Diakses pada Minggu 15 oktober 2017 pukul 18:16

membuat peneliti memilih Kelurahan Cipedes yaitu peneliti beranggapan KIM kelurahan Cipedes berhasil menjalankan komponen *Open Government* Indonesia (transparansi, partisipasi, inovasi) terbukti dari Kelurahan Cipedes mendapatkan juara kedua KIM terbaik di Indonesia¹³. KIM Cipedes mendapat juara 2 dikarenakan keberadaan KIM Cipedes mengolah informasi sebagai bahan masukan berbagai pihak yaitu pemerintah maupun masyarakat sehingga membantu masyarakat menjadi lebih mudah di dalam mendapatkan informasi. Informasi yang diberikan KIM akurat maka warga Cipedes pun mempunyai informasi di wilayahnya. Informasi yang di dapat bisa seputar lingkungan, kebersihan dan gagasan ataupun masukan dari warga¹⁴ Masalah tersebut penting diteliti karena keterbukaan informasi penting demi mendukung pelaksanaan *good government* di Indonesia. Dikarenakan pemerintahan yang baik seharusnya menciptakan pemerintahan yang terbuka.

1.2 Pertanyaan Penelitian

- Bagaimana peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Cipedes dalam pelaksanaan transparansi *Open Government* ?
- Bagaimana peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Cipedes dalam pelaksanaan partisipasi *Open Government* ?

¹³ <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/09/14/pemprov-jabar-gelar-kominfo-award-2017-ini-daftar-pemenangnya-409403>. Diakses pada Jum'at 24 Agustus 2018 pukul 14:23

¹⁴ <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/11/02/kim-media-komunikasi-antarwarga-kota-bandung-383737>. Diakses pada Jum'at 24 Agustus 2018 pukul 14:50

- Bagaimana peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Cipedes dalam pelaksanaan inovasi *Open Government* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis peran KIM Cipedes dalam pelaksanaan transparansi *Open Government*
2. Menganalisis peran KIM Cipedes dalam pelaksanaan partisipasi *Open Government*
3. Menganalisis peran KIM Cipedes dalam pelaksanaan inovasi *Open Government*

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermaksud untuk menyumbangkan pemahaman ilmiah mengenai peran KIM Cipedes dalam mewujudkan keterbukaan informasi public

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi berbagai pihak, sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini membahas mengenai peran KIM di dalam mewujudkan *Open Government*. Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Subyek Penelitian Bab V Pembahasan Hasil Penelitian, Bab VI Kesimpulan dan Saran